

## Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palu

### *Effect Of Presentation Of Regional Financial Statements And Accessibility Of Regional Financial Statements On Transparency And Accountability Of Regional Financial Management In Palu City*

Guasmin<sup>1</sup>, Dasa Febrianti<sup>2</sup>,

<sup>1,2</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu

\*Korespondensi Penulis: [guasmingu@gmail.com](mailto:guasmingu@gmail.com)

#### Abstrak

Dari hasil perhitungan, dengan menggunakan analisis model regresi linear berganda menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan dan signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai F-hitung sebesar 41,317 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai F-hitung tersebut lebih besar dari nilai F-tabel yaitu  $41,317 > 3,122$ . Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh persial dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t-hitung sebesar 2,206 pada tingkat signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai t-hitung tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $2,206 > 1,993$ . Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh simultan dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t-hitung sebesar 4,558 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai t-hitung tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $4,558 > 1,993$ .

**Kata Kunci:** Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan..

#### Abstract

*From the calculation results, using the analysis of multiple linear regression models shows that the presentation of regional financial statements and the accessibility of regional financial reports together or simultaneously and a significant positive and significant effect on the transparency and accountability of regional financial management. This is supported by the F-calculated value of 41.317 at a significance level of 0.000 which is smaller than 0.05 which means that the F-calculated value is greater than the F-table value of  $41.317 > 3.122$ . The presentation of regional financial reports has a significant and persial effect on the transparency and accountability of regional financial management. This is supported by the t-value of 2.206 at a significance level of 0.031 which is smaller than 0.05 which means that the t-value is greater than the t-table value of  $2.206 > 1.993$ . The accessibility of regional financial reports has a simultaneous and significant effect on the transparency and accountability of regional financial management. This is supported by the t-count value of 4.558 at a significance level of 0,000 which is smaller than 0.05 which means that the t-value value is greater than the t-table value of  $4.558 > 1.993$ .*

**Keywords:** Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements and Transparency and Accountability of Financial Management

## **PENDAHULUAN**

Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: (1) Krisis ekonomi telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. (2) Desentralisasi fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu konsekuensinya, Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Palu, penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dilihat dari sisi fenomena kualitas laporan keuangan yang ditinjau hasil pengamatan masih terdapat sebagian besar instansi pemerintah dimana penyusutan aset tetap daerah yang seharusnya dicatat, tapi hanya dilaporkan tanpa diperhitungkan seberapa besar penyusutannya. Sedangkan ditinjau dari hasil pemeriksaan laporan keuangan bahwa rapor merah yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palu (Pemkot) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013.

Penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut mengharuskan Kepala Daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan yang baru yaitu: Neraca daerah dan laporan arus kas.

Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah. Pada kenyataannya, berdasarkan survey ke sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) ini tidak serta-merta dapat menyusun dua buah laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca, belum dimilikinya neraca oleh pemerintah daerah disebabkan, antara lain, karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut. Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam Pasal 116 Ayat (4a) Pasal 116 berbunyi, untuk memenuhi asas transparansi. Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna eksternal laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) Pemerintah di Kota Palu, yang dalam hal ini populasi yang dituju oleh peneliti adalah Anggota DPRD dan LSM di Daerah Kota Palu. Dalam menentukan jumlah besarnya sampel dari total populasi sebanyak 85 orang. Model penelitian di atas menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu, analisis regresi akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis 1 dan 2 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi

individual (uji t) dan pengujian hipotesis 3 akan dilakukan dengan pengujian signifikansi simultan (uji F). Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Analisis Regresi Berganda**  
Hasil perhitungan dengan menggunakan model regresi (*Model Regrssion*) diperoleh dengan nilai koefisien regresi, seperti yang terlihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**

### Hasil Pengolahan Regresi Linear Berganda

Dependent Variabel Y = Transparansi dan Akuntabilitas LKPD						
Variabel	Re g. Co eff	Std . Error	Bet a	t Hitung	t Tabel	Sig
C = Constanta	0,857	0,328		2,615		0,011
X1 = Penyajian LKPD	0,179	0,087	0,186	2,070	1,909	0,042
X2 = Aksesibilitas LKPD	0,624	0,089	0,628	7,001	1,909	0,000
R = 0,752						
F-Hitung = 53,506						
R-Square = 0,566						
F-Tabel = 3,108						
Durbin Waston = 2,188						
Sig. F = 0,000						

Sumber : Hasil olahan data

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh, ditunjukkan pada Tabel 1 tersebut di atas, maka diperoleh persamaan regresi yang dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = 0,857 + 0,179 (X1) + 0,624 (X2)$$

Pada persamaan model regresi linear berganda, diperoleh nilai koefisien regresi variabel bebas (X) yaitu Penyajian Laporan Keuangan (X1) positif dan Aksesibilitas LKPD (X2) positif, nilai koefisien variabel bebas yang positif artinya apabila terjadi perubahan pada variabel bebas (X), akan menyebabkan perubahan secara searah pada variabel terikat (Y) yaitu Transparansi dan Akuntabilitas LKPD, demikianpun sebaliknya. Dengan kata lain bahwa variabel Transparansi dan Akuntabilitas LKPD (Y) sebesar = 0,857 apabila belum ada pengaruh dari variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas LKPD (X2) atau sama dengan 0 (nol), sementara variabel Transparansi dan Akuntabilitas LKPD (Y) akan meningkat sebesar 0,179 dari nilai konstanta 0,857 apabila telah terjadi peningkatan 1 (satu) nilai pada variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1), demikian pula halnya pada variabel Aksesibilitas LKPD (X2) bila terjadi peningkatan 1 (satu) nilai maka akan meningkatkan variabel Transparansi dan Akuntabilitas LKPD (Y) sebesar 0,624 dari nilai konstan sebesar 0,857 dengan asumsi tidak ada pengaruh dari variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) atau sama dengan 0 (nol). Sedangkan untuk nilai koefisien korelasi sebesar 0,752 menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara variabel Periklanan Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas LKPD (X2), terhadap variabel Transparansi dan Akuntabilitas LKPD (Y), dengan interval koefisien 0,70 – 0,799 (Sugiyono, 2004). Demikian halnya pada R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,566 menunjukkan bahwa 56,6% Transparansi dan Akuntabilitas LKPD ditentukan oleh variabel Penyajian Laporan Keuangan (X1) dan Aksesibilitas LKPD (X2), sehingga terdapat 43,4% variabel lain yang tidak menjelaskan variabel Transparansi dan Akuntabilitas LKPD dan yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini, yaitu sistem informasi keuangan, kualitas laporan keuangan, karakteristik laporan keuangan dan penyejiaan neraca

## KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap hasil penelitian, pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan yaitu : Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan dan

signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai F-hitung sebesar 53,506 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai F-hitung tersebut lebih besar dari nilai F-tabel yaitu  $41,317 > 3,108$ . Kemudian pada penyajian laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t-hitung sebesar 2,070 pada tingkat signifikansi sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05  $2,070 > 1,993$ , dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didukung dengan nilai t-hitung sebesar 7,001 pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa nilai t-hitung tersebut lebih besar dari nilai t-tabel yaitu  $7,001 > 1,993$ .

#### SARAN-SARAN

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini : Responden yang dipilih dalam penelitian ini hanya berasal dari anggota DPRD dan LSM di Kota Palu. Hal ini mungkin menimbulkan masalah tingkat keterwakilan responden dari masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya responden masih dapat diperluas lagi, misalnya: lembaga keuangan (bank dan nonbank), pers, akademisi, dan perusahaan.

Pembahasan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas publik sangatlah luas, namun pada penelitian ini permasalahan hanya dianalisis secara kuantitatif. Untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan lebih rinci jika penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif. Dan profil responden yang mengisi kuesioner di dalam penelitian ini hanya menyajikan asal organisasinya saja tanpa disebutkan background pendidikannya secara detail, jenis kelamin dan umur. Oleh karena Penelitian ini berkaitan dengan laporan keuangan daerah, di mana tidak setiap orang mampu membaca dan memahami laporan keuangan tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dalam penyajian deskripsi responden data-data mengenai background responden sebaiknya

disajikan secara lebih detail; terutama tingkat pendidikannya, karena latar belakang pendidikan cukup berpengaruh dalam kemampuan membaca dan memahami laporan keuangan daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :PT. Reneka Cipta.
- Bastian ,2007 “*Analisis Kemandirian Otonomi Daerah*”, *Joernal ESP Vol.1*.
- Denisky, 2007 “ *Konsep dan Pengukuran Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah* ” Penerbit Erlangga Jakarta
- Diamond, Jack, 2007, “*Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?*”. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Erik Wibowo,2007 “*Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data*” Penerbit Erlangga Jakarta
- Ghozali, Imam, 2005, “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”, Edisi 3, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2007, “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*”, Edisi 3, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Governmental Accounting Standard Board, 2010, “*Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*”.GASB, Norwalk, Conn.
- Hadi, Sumarsono, 2007, “*Analisis Kemandirian Otonomi Daerah*”, *JESP Vol.1*. Hanim, Sustika, 2009, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansidan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa, Skripsi*, Jurusan Ekonomi.
- Halim, Abdul, 2007, “*Akuntansi Keuangan Daerah*”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hanim, Sustika, 2009, “*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa,

- Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Harahap, 2007 *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Malang, Skripsi*, Jurusan Ekonomi.
- Istijanto, 2008. *Riset Sumber Daya Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Jones, D. B 2007. "The Needs of Users of Governmental Financial Reports". *Government Accounting Standards Board*.
- Jones, Rowan dan Maurice Pendlebury, 2007, *Public Sector Accounting, 5th Edition, Prentice Hall, London*
- Kuncoro, Mudrajad, 2006, "Metoda Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi", *Penerbit Erlangga, Jakarta*.
- Mardiasmo, 2005, "Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Penerbit Andi, Yogyakarta*
- Mardiasmo, 2006, "Akuntansi Sektor Publik" *Penerbit Andi, Yogyakarta*.
- Mardiasmo 2007, "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik": Suatu Sarana Good Governace, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No.1, Mei 2006.
- Mulyana 2006 "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah" (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Langsa, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Nordiawan ,2011 "Peningkatan Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Lingkungan Sektor Publik" *Penerbit Refika Aditama, Bandung*.
- Perwujudan Akuntabilitas Publik "(Studi Kasus di Provinsi Daerah Sulawesi Tengah)",
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 *tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 *tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 *tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 **tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.**
- Ridwan dkk, 2007 “*Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*”. **Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.**
- Rohman, Abdul, 2009, “*Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*”. **Jurnal Akuntansi dan Bisnis** Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. “*Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999*.” **Financial Accountability & Management**. Vol. 18 (3).
- Safitri, Ratna Amalia, 2009, *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*, **Skripsi** Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sekaran, 2006 “*Metoda Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*”, **Penerbit Erlangga, Jakarta.**
- Shende, Suresh dan Tony Bennet, 2007, Concept Paper 2: “*Transparency and Accountability in Public Financial Administration*”, **UN DESA.**
- Sopamah dan Mardiasmo, 2007, “*Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengatahuan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*”, **Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI di Surabaya.**
- Steccolini, Ileana, 2009, “*Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms*”, **Dublin, September 2009.**
- Sugiyono, 2006, **Metoda Penelitian Bisnis, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.**
- Sugiyono, 2007, **Metoda Penelitian Bisnis, Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung.**
- Sumardi, SH .2012 : Selaku Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , **dalam** *sambutannya, Tentang Menjalin Kerja Sama Pemerintah Daerah BPK secara Elektronik dengan Audit yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI) Palu Sulawesi Tengah.*
- Sumber data Badan Pusat Statistik Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah “*Rencana Anggaran Pendapatan Daerah 2013*”
- Sumber data Bagian Humas Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu “*Populasi Penelitian*” **Sumber data tahun 2009-2013**
- Sumber data Baskesbang Kota Palu “*Populasi Penelitian*” **Sumber data tahun 2011-2013**
- Sumber data Dewan Standar Akuntansi Keuangan “*Penyajian Laporan Mkeuangan Sektor Publik*”
- Sujana , 2010 “*Metoda Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, **PT Raja Grafindo Persada, Bandung.**
- Ullum, 2007 “*Perwujudan Good Governance*” **Penerbit Universitas Gajah Mada. yogyakarta**
- Umar, Husein, 2007, **Metoda Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.**